

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Peran Pemerintah dalam Pengembangan Usaha Tahu Tempe di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran yang sesuai dengan temuan penelitian.

A. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah dalam Pengembangan Usaha Tahu Tempe di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dapat dikategorikan cukup baik. Kenyataan ini terbukti dari penelitian yang dilakukan terhadap 4 indikator yaitu: peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai dinamisator , peran pemerintah sebagai fasilitator, peran pemerintah sebagai Katalisator. Dalam Peran Pemerintah dalam Pengembangan Usaha Tahu Tempe di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dari 56 responden diperoleh total skor secara keseluruhan sebanyak 1422 berada pada kategori Cukup Baik karena berada pada interval 1121-1568.
2. Faktor pendukung yang didapat adalah peran pemerintah sebagai regulator, kemudian faktor pendukung yang kedua yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator . Sedangkan faktor penghambat yang

didapat yaitu masih rendahnya peran pemerintah sebagai dinamisator , kemudian faktor penghambat yang kedua adalah masih rendahnya peran pemerintah sebagai katalisator.

B. Saran

1. Disarankan kepada Lurah Bukit Batrem mengadakan pendampingan secara berkala untuk memotivasi para warga kelurahan dalam menjalankan usaha mereka dengan tata kelola usaha yang baik khususnya pada aspek produk. Dengan menerapkan pengetahuan mengenai kemasan yang baik. pemberian merek, dan label produk tahu tempe yang di dapat dari pelatihan ini, kelak usaha yang mereka jalani akan lebih berkembang dan produk mereka lebih berdaya saing serta meningkatnya minat beli konsumen baik pasar tradisional dan modern.
2. Mengingat diperlukannya pembinaan lebih lanjut dan berkesinambungan kepada kelompok usaha ini, maka disarankan perlu kembali diadakan pelatihan dan pendampingan pada aspek-aspek yang disebutkan di atas, bahkan bila mungkin wilayah Kelurahan Bukit Batrem dapat dijadikan sebagai daerah binaan sehingga dapat dijadikan wilayah percontohan bagi pelaku usaha UMKM lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Diva, Gede, Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta. Jakarta: Bakrie School of Managenent, 2009.
- Edi Suharto, Aep Gunarsa, Membangun masyarakat memberdayakan rakyat : kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Fadli dalam Kozier Barbara, Konsep Derivasi dan Implikasinya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Hernadi Affandi, Pengertian Pemerintahan Menurut Doktrin, Materi Kuliah Hukum Pemerintah Daerah, Prodi Ilmu Hukum Unsika, 2016.
- Iyas, Y. Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Humaniora, 2014.
- Nurdin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. , Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu kabupaten Gowa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1) , 2014.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Pasolong, Harbani, Teori Administrasi Publik. Yogyakarta: Alfabeta, 2012.

Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang baik Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menu Good Governance (Kepemerintahan yang Baik), CV. Mandar Maju, Bandung, 2004.

Soewadji, Jusuf, Pengantar Metodologi Penelitian, Mitra Wacana Media, 2014

Soerjono Soekanto , Budi Sulistyowati, Sosiologi suatu pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 2016.

Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2017.

Zulganef, Metode Penelitian Bisnis Dan Manajemen, Refika, Bandung, 2018.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah tentang bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang
Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Kecamatan

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor: 2 tahun 2002 Tentang
Pembentukan Kelurahan.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai
Selatan.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kelurahan.